

PENOLAKAN VIKTOR ORBAN TERHADAP RANCANGAN SANKSI UNI EROPA KE RUSIA

Syahdira Ayu Shandra Dessiyanti Putri¹

Abstract:

The conflict between Russia and Ukraine which was tense in 2021 heated up again when Vladimir Putin announced to send his military forces to Ukrainian territory on 23 February 2022. The European Union which supports Ukraine condemned Russia's actions and imposed several sanctions on Russia as an ultimatum for Russia to stop the military action. In the sanctions issued by the European Union to Russia, three sanctions plans include energy sanctions which were rejected by Hungarian Prime Minister Viktor Orban in a press statement. Therefore, this research examines Viktor Orban's rational choice to reject several European Union sanctions on Russia. This research uses explanatory research methods which aim to explain the reasons behind Viktor Orban's rejection of European Union's sanction plan on Russia which were stated in a press conference. This research uses the Rational Choice theory which was initiated by Graham T. Allison. Rational Choice explains the rational choice process taken by a rational actor who considers all options and acts based on the best course of action based on rational calculations. These considerations will explain how Viktor Orban made the best decision and chose to reject the European Union's sanction package plan against Russia.

Keywords: *Viktor Orban, sanctions, rejection of the European Union, Russia, rational choice*

Pendahuluan

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina diawali dengan adanya aneksasi Rusia terhadap Krimea dari Ukraina yang melanggar integritas teritorial bekas Republik Soviet pada bulan Februari tahun 2014 (Center for Preventive Action, 2024). Kemudian, pada tahun 2021, ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali menegang saat Rusia membangun pangkalan militer berskala besar di dekat perbatasan Ukraina Timur sehingga menimbulkan kekhawatiran besar (Consilium European Council, 2023). Pembangunan ini dianggap sebuah ancaman oleh Ukraina dan Eropa dimana sebelumnya terjadi aneksasi Rusia terhadap Krimea. Oleh karena itu Uni Eropa lalu mengambil tindakan yang tertera dalam *Joint statement following the 23rd EU-Ukraine Summit* pada 12 October 2021 yang menegaskan akan mendukung Ukraina dan melawan agresi Rusia selama diperlukan (President of Ukraine, 2021).

Para pemimpin Uni Eropa dalam beberapa kesempatan sudah lebih dulu menuntut Rusia agar segera menghentikan aksi militernya, menarik semua pasukan dan peralatan militer dari perbatasan Ukraina tanpa syarat, serta menghormati integritas, kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina (Consilium European Council, 2023). Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui mengumumkan secara terbuka perihal mengirimkan pasukan militer Rusia ke wilayah Ukraina pada 23 Februari 2022 (Troianovski & MacFarquhar, 2022a). Hingga Presiden Putin mengumumkan operasi militer itu, diketahui banyak negara-negara yang memberikan sanksi kepada Rusia sebagai bentuk kecaman mereka atas tindakan Rusia kepada Ukraina yang dianggap tidak beralasan dan tidak dapat

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : syahdiraayu@gmail.com.

dibenarkan. Kecaman tersebut didasari oleh *Joint statement following the 23rd EU-Ukraine Summit* (Consilium European Council, 2023).

Uni Eropa akhirnya mengambil langkah dengan mengadopsi sejumlah sanksi sebagai tanggapan atas serangan militer Rusia. Tercatat bahwa sejak operasi militer Rusia ke Ukraina yang dimulai dari tanggal 23 Februari 2022, Uni Eropa telah mengeluarkan 10 paket sanksi dalam kurun waktu 23 Februari 2022 sampai 25 Februari 2023. Dari 10 paket sanksi tersebut, terdapat paket sanksi yang berisikan mengenai sanksi energi yang tertera pada paket sanksi ke-6, sanksi ke-8, dan sanksi ke-10.

Sanksi-sanksi yang dirancang dan disahkan oleh Uni Eropa dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Uni Eropa tersebut diputuskan dengan menggunakan metode *qualified majority* (Consilium European Council, 2023c). Saat pengambilan suara terhadap rancangan sanksi-sanksi tersebut, setiap negara anggota Uni Eropa diharapkan dapat memberikan dukungan suara agar rancangan paket sanksi dapat diputuskan dan dikeluarkan oleh Uni Eropa. Namun, sebelum dilakukan pengambilan suara terhadap rancangan sanksi, khususnya sanksi ke-6, sanksi ke-8, dan sanksi ke-10, terdapat respon berupa penolakan dari salah satu pemimpin negara anggota Uni Eropa yaitu Viktor Orban.

Viktor Orban selaku Perdana Menteri Hungaria memberikan *statement* pada beberapa pers dengan mengatasnamakan Hungaria bahwa dari 10 paket sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, terdapat beberapa sanksi yang tidak didukung oleh Hungaria yaitu paket sanksi ke-6, paket sanksi ke-8, dan paket sanksi ke-10. *Statement* pertama dikutip dari Reuters pada 6 Mei 2022, dimana Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyatakan bahwa Hungaria tidak dapat mendukung paket sanksi baru Uni Eropa, yang mencakup embargo impor minyak (Reuters, 2022). *Statement* kedua dikutip dari Reuters pada 29 September 2022 melalui juru bicara Perdana Menteri Viktor Orban yang mengatakan bahwa Hungaria tidak dapat mendukung putaran kedelapan sanksi yang direncanakan Uni Eropa terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina jika sanksi tersebut mengandung sanksi energi (Than & Komuves, 2022). *Statement* yang ketiga disampaikan melalui juru bicara Perdana Menteri Hungaria, Gergely Gulyás, pada 23 Oktober 2022 yang mengatakan bahwa Hungaria tidak akan mengizinkan Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia dan akan terus memveto setiap sanksi Uni Eropa yang mempengaruhi pasokan gas Rusia (Shargh, 2022).

Viktor Orban selaku Perdana Menteri Hungaria, dimana negara yang ia pimpin merupakan negara anggota dari Uni Eropa, seharusnya menunjukkan dukungannya terhadap ketentuan dan imbauan Uni Eropa. Namun, fakta yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terdapat penolakan dari Viktor Orban selaku Perdana Menteri Hungaria terhadap paket sanksi Uni Eropa yang berisikan sanksi energi ke Rusia. Sehingga yang akan diteliti adalah apa alasan Viktor Orban selaku Perdana Menteri Hungaria mengeluarkan pernyataan menolak terhadap rancangan sanksi Uni Eropa ke Rusia melalui pernyataan persnya.

Kerangka Teori

A. Teori *Rational Choice*

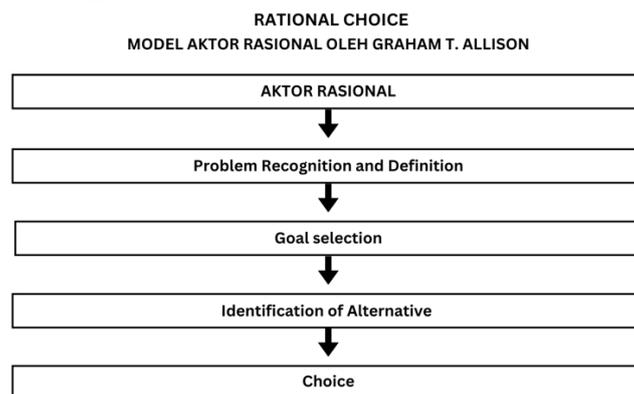
Teori *Rational Choice* menurut Graham T. Allison merupakan studi yang membandingkan perilaku negara dengan perilaku individu yang sangat rasional, yang diasumsikan memiliki pengetahuan situasional sempurna dan berupaya mengoptimalkan nilai atau tujuan apa pun yang dicari dalam situasi tertentu (Allison, 1971). Allison menggambarkan Model Aktor Rasional, dimana model ini menempatkan pemerintah atau negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional (Bendor & Hammond, 1992).

Allison mengasumsikan bahwa negara-negara mempertimbangkan semua opsi dan bertindak berdasarkan tindakan terbaik, berdasarkan perhitungan rasional mereka dalam memaksimalkan utilitasnya, dengan memilih negara yang memiliki “imbangan” tertinggi (Bendor & Hammond, 1992).

Dalam model Aktor Rasional, Allison (1971) membagi beberapa poin mengenai penjelasan tindakan yang diambil oleh Aktor Rasional dengan pilihan rasional.

1. Pelaku Nasional (*National Actor*). Bangsa atau pemerintah, yang dipahami sebagai pengambil keputusan yang rasional dan bersatu, adalah agennya.
2. Masalahnya (*The Problem*). Tindakan dipilih sebagai respons terhadap permasalahan strategis yang dihadapi bangsa.
3. Seleksi Statis (*Static Selection*). Jumlah aktivitas perwakilan pemerintah yang relevan dengan suatu permasalahan merupakan apa yang telah dipilih oleh negara sebagai “solusi”.
4. Tindakan sebagai Pilihan Rasional (*Action as Rational Choice*). Komponennya meliputi:
 - a) Maksud dan Tujuan (*Goals and Objectives*). Keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan kategori utama yang menjadi dasar penyusunan tujuan strategis.
 - b) Pilihan (*Options*). Berbagai tindakan yang relevan dengan masalah strategis dan spektrum pilihan.
 - c) Konsekuensi (*Consequences*). Pemberlakuan setiap alternatif tindakan akan menghasilkan serangkaian konsekuensi. Konsekuensi yang relevan merupakan *benefit* dan *cost* dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran strategis.
 - d) Pilihan (*Choice*). Pilihan rasional bersifat memaksimalkan nilai. Aktor rasional memilih alternatif yang konsekuensinya memiliki peringkat tertinggi dalam hal tujuan dan sasarannya.

Gambar 1. Bagan teori *Rational Choice* dari Graham T. Allison



Sumber: Dokumentasi pribadi

Allison juga berasumsi bahwa Aktor Rasional akan menekankan pentingnya logika dan memaksimalkan nilai berdasarkan rumus berikut: kemungkinan suatu tindakan tertentu dihasilkan dari kombinasi negara-negara (1) nilai dan tujuan yang relevan, (2) alternatif tindakan yang dirasakan, (3) perkiraan berbagai rangkaian konsekuensi (yang akan mengikuti dari setiap alternatif) dan (4) penilaian bersih dari masing-masing konsekuensi (Allison, 1971). Hal ini kemudian menghasilkan dua proposisi, yaitu:

- 1) Peningkatan biaya suatu alternatif (pengurangan nilai serangkaian konsekuensi yang akan mengikuti suatu tindakan, atau pengurangan kemungkinan mencapai konsekuensi tetap) mengurangi kemungkinan terpilihnya tindakan tersebut.
- 2) Penurunan biaya suatu alternatif (peningkatan nilai konsekuensi yang akan terjadi setelah suatu tindakan, atau pengurangan kemungkinan mencapai konsekuensi tetap) meningkatkan kemungkinan terpilihnya tindakan tersebut.

Allison menekankan bahwa Aktor Rasional akan menggunakan prinsip-prinsip tindakan rasional, rincian perilaku, pernyataan pejabat pemerintah, dan makalah pemerintah untuk menyaring komisi dan kelalaian, sehingga menghasilkan gambaran yang koheren muncullah pilihan yang memaksimalkan nilai (dari sudut pandang bangsa) (Allison, 1971).

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Jenis data dalam penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu *library research* (studi kepustakaan). Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Sistem Politik di Hungaria

Hungaria merupakan negara anggota Uni Eropa yang bergabung pada 1 Mei 2004 (Pposing Europe Research Network, 2023). Bergabungnya Hungaria menjadi negara anggota Uni Eropa ini diinisiasi oleh Viktor Orban dan partai Fidesz yang berkomitmen untuk mendukung akses Hungaria ke Uni Eropa. Inisiasi ini dilakukan karena Viktor Orban memiliki harapan akan keuntungan politik dalam negeri, ditambah adanya kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi partai Fidesz (Pposing Europe Research Network, 2023). Sebagai sebuah negara anggota Uni Eropa yang sah, Hungaria mengalami beberapa perubahan baik dalam negeri maupun luar negeri demi memenuhi persyaratan keanggotaan yang disebut Kriteria Kopenhagen (Pposing Europe Research Network, 2023), terutama dalam sistem politik negara tersebut.

Sistem politik Hungaria berbentuk republik demokrasi parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan di badan legislatif dan Presiden sebagai kepala negara yang memegang posisi seremonial di badan eksekutif (Magyarország Kormánya, 2011). Pemerintah (*government*) bertanggung jawab kepada Parlemen (*Parliament*), sehingga Parlemen mempunyai hak untuk memantau pekerjaan Pemerintah (Website of The Hungarian Government, 2019). Berdasarkan Konstitusi Hungaria, perdana menteri memiliki peran utama dalam cabang eksekutif saat ia memilih menteri kabinet, memiliki hak eksklusif untuk memberhentikan mereka, dan menjadi kepala pemerintahan (Amnesty International, 2021). Sedangkan Presiden menunjuk perdana menteri dari partai mayoritas atau koalisi di parlemen setelah pemilihan nasional setiap empat tahun (Magyarország Kormánya, 2011).

Tugas Perdana Menteri adalah menentukan arah umum kebijakan pemerintah dalam konteks program Pemerintah. Perdana Menteri juga memimpin rapat kabinet dan memastikan pelaksanaan keputusan Pemerintah (Website of The Hungarian Government, 2019). Saat ini, Katalin Éva Veresné Novák menjabat sebagai Presiden Hungaria (DBpedia, 2023) dan Viktor Orbán menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria (Britannica, 2023). Sejak pemilu tahun 2010, Viktor Orbán dan Partai Fidesz sudah

memenangkan pemilu dan berkuasa di Hungaria hingga tahun 2023 (Amnesty International, 2021).

B. Hubungan Kerja Sama Hungaria - Rusia Dalam Bidang Energi

Ikatan hubungan antara Hungaria dan Rusia bermula pada tahun 2010 ketika partai Fidesz memenangkan pemilu dengan suara dua per tiga mayoritas. Untuk mengembalikan perekonomian Hungaria ke arah yang lebih baik dan untuk menyingkirkan peninggalan-peninggalan pemerintahan sosialis sebelumnya, pemerintah Fidesz membuat program reformasi dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengumumkan program tersebut sebagai kebijakan *Eastern Opening* (Pembukaan Timur). Kebijakan *Eastern Opening* ini untuk tujuan meningkatkan ekspor negara ke pasar Asia yang berkembang pesat dengan bantuan langkah-langkah diplomatik yang efektif, pertemuan tingkat tinggi dan perjanjian strategis. Sejak kebijakan tersebut diumumkan, Perdana Menteri Orban mulai bertemu secara bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin lebih sering daripada bertemu dengan pemimpin di Eropa lainnya (Rácz, 2021).

Hubungan selanjutnya dapat dilihat dari riwayat Hungaria yang mengontrak Rosatom Rusia, perusahaan Rusia yang berspesialisasi dalam energi nuklir, barang non-energi nuklir dan produk berteknologi tinggi, untuk membangun dua blok pembangkit listrik VVER 1200 tenaga nuklir baru di Paks tanpa mengumumkan tender publik pada tahun 2014 (Rácz, 2021, Rosatom, 2023, Szőke, 2023). Diketahui bahwa proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut dibiayai oleh Rusia senilai €12 miliar dan rekan terdekat Orban yaitu oligarki Lőrinc Mészáros merupakan salah satu subkontraktor utama Hungaria dalam proyek tersebut (Rácz, 2021).

Hubungan keduanya semakin intens ketika Hungaria menandatangani kesepakatan 15 tahun dengan Rusia melalui perwakilan MVM grup energi Gazprom di Budapest pada 27 September 2021 (RFE/RL's Russian Service, 2021). Hungaria menggunakan 10 miliar meter kubik gas alam setiap tahun dan hampir 85% di antaranya berasal dari Rusia serta lebih dari 65%-80% minyak mentah Hungaria berasal dari Rusia melalui pipa Druzhba (International Trade Administration, 2022, Szőke, 2023). Semakin besar pasokan energi Rusia kepada Hungaria, semakin kecil rencana Hungaria untuk mengubah maupun memutus hubungan mereka. Harga energi yang rendah untuk rumah tangga adalah kunci utama bagi pemerintah Fidesz mempertahankan kekuasaannya di Hungaria. Hungaria juga menganggap bahwa isu pasokan energi merupakan murni kebutuhan negara, bukan mengenai langkah pilihan politik yang diambil Hungaria (Koh, 2023).

C. Keterlibatan Uni Eropa Dalam Konflik Rusia - Ukraina

1) Dasar Keterlibatan Uni Eropa

Keterlibatan Uni Eropa dalam konflik Rusia - Ukraina diawali dengan adanya ketegangan antara Ukraina dengan Rusia pada tahun 2021. Tepatnya pada 6 April 2021, Rusia mengumumkan dimulainya latihan militer massal, sehingga meningkatkan ketegangan dengan Ukraina (Walker, 2023). Setelah pengumuman oleh Rusia tersebut dan dinamika politik keamanan lainnya, akhirnya pada 21 Februari 2022, Presiden Putin mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang memproklamkan diri (Walker, 2023). Hingga pada 23 Februari 2022 menyusul pengumuman terbuka mengenai Presiden Putin memerintahkan pasukan Rusia memasuki wilayah (Troianovski and MacFarquhar, 2022).

Keterlibatan Uni Eropa dalam konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi karena adanya agenda *Joint statement following the 23rd EU-Ukraine Summit* pada 12 October 2021 (President of Ukraine, 2021). Dalam pertemuan KTT tersebut, terdapat

dua poin pernyataan yang disampaikan dengan tegas oleh Uni Eropa mengenai keberpihakannya kepada Ukraina, yaitu:

- 1) Uni Eropa menegaskan dukungan dan komitmennya yang teguh terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas negara yang diakui secara internasional.
- 2) Uni Eropa menegaskan kecaman keras kami atas pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina melalui tindakan agresi angkatan bersenjata Rusia sejak Februari 2014. Kami tidak mengakui dan terus mengutuk aneksasi ilegal Republik Otonomi Krimea dan Kota Sevastopol di Ukraina oleh Rusia, meningkatnya militerisasi di semenanjung tersebut, memburuknya situasi hak asasi manusia di sana, serta pembatasan kebebasan berekspresi warga Ukraina ke dan dari Semenanjung Krimea.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam mendukung Ukraina dalam konflik Rusia – Ukraina juga berdasarkan Traktat Lisbon yang menjadi dasar konstitusional Uni Eropa. Pasal Traktat Lisbon yang mendasari dukungan Uni Eropa ke Ukraina yaitu Pasal 2 dan Pasal 21. Dalam Pasal 2 Traktat Lisbon disebutkan bahwa Uni Eropa didirikan berdasarkan nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas. Dalam Pasal 21 Traktat Lisbon disebutkan bahwa tindakan dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan Uni Eropa di kancah internasional harus berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan isi dalam pasal 2 dan pasal 21 Traktat Lisbon, Uni Eropa melihat Rusia telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam kedua pasal tersebut. Seperti yang diberitakan oleh BBC pada 20 Juli 2023 bahwa PBB mengatakan pasukan Rusia di Ukraina bertanggung jawab atas penyiksaan, pemerkosaan, serta pembunuhan yang meluas (BBC, 2023). Selain itu juga dilaporkan oleh BBC bahwa PBB mengatakan Rusia turut bertanggung jawab atas kejahatan terhadap manusia dengan menyerang infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan bendungan (BBC, 2023).

Dengan melihat tindakan-tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Uni Eropa dalam konflik Rusia – Ukraina dalam memberikan dukungan ke Ukraina berdasarkan hasil dari agenda *Joint statement following the 23rd EU-Ukraine Summit* yang didukung dengan adanya Traktat Lisbon Pasal 2 dan Pasal 21. Kedua hal tersebut yang membuat Uni Eropa menegaskan keberpihakannya dalam membantu Ukraina.

2) Bentuk Keterlibatan Uni Eropa

Menanggapi agresi militer Rusia pada tanggal 23 Februari 2022, Uni Eropa mengambil langkah tegas dalam mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan dana ke Ukraina dan mengadopsi sejumlah sanksi secara besar-besaran. Terdapat sepuluh rancangan paket sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia atas agresi militer ke Ukraina dalam kurun waktu 23 Februari 2022 hingga 25 Februari 2023. Kesepuluh sanksi tersebut diputuskan berdasarkan metode pengambilan suara mayoritas yang memenuhi syarat (*qualified majority*). Dari sepuluh rancangan paket sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, terdapat tiga rancangan paket sanksi yang ditolak oleh Viktor Orban.

Pertama yaitu rancangan paket sanksi ke-6 yang dikeluarkan pada 3 Juni 2022. Rancangan paket sanksi tersebut berisikan larangan berupa membeli, mengimpor atau

mentransfer, langsung atau tidak langsung, minyak mentah atau produk minyak bumi jika berasal dari Rusia atau diekspor dari Rusia (Official Journal of The European Union, 2022). Alasan dikeluarkannya rancangan paket sanksi ini karena Dewan PBB melaporkan bahwa pasukan Rusia di Ukraina bertanggung jawab atas serangan udara di sebuah teater di Mariupol yang menampung anak-anak, serta bertanggung jawab atas pembunuhan yang meluas hingga ditemukannya 400 mayat warga sipil di Bucha, dekat Kyiv pada bulan April 2022 (BBC, 2023).

Kedua yaitu rancangan paket sanksi ke-8 yang dikeluarkan pada 6 Oktober 2022. Rancangan paket sanksi tersebut berupa pelarangan menyediakan transportasi laut dan memberikan bantuan teknis, layanan perantara atau pembiayaan atau bantuan keuangan, terkait dengan transportasi laut ke negara ketiga minyak mentah (per Desember 2022) atau produk minyak bumi (per Februari 2023) yang berasal di atau diekspor dari Rusia (Consilium European Council, 2022). Alasan dikeluarkannya rancangan paket sanksi ini karena meningkatnya perang agresi Rusia terhadap Ukraina dan bertambahnya aneksasi ilegal di wilayah Zaporizhzhia dan Kherson Ukraina.

Ketiga yaitu rancangan paket sanksi ke-10 yang dikeluarkan pada 25 Februari 2023. Rancangan paket sanksi tersebut berisikan larangan berupa larangan ekspor barang teknologi dan industri penting, larangan impor aspal dan karet sintesis, dan larangan penyediaan kapasitas penyimpanan gas untuk Rusia (Official Journal of The European Union, 2023). Alasan dikeluarkannya rancangan paket sanksi ini karena adanya tindakan yang mendestabilisasi situasi di Ukraina oleh Rusia sehingga menyebabkan kelaparan massal dan melakukan teror rudal yang brutal terhadap sasaran sipil. (Official Journal of The European Union, 2023).

D. Alasan Viktor Orban Menolak Rancangan Sanksi Uni Eropa Ke Rusia

Penulis akan menjelaskan operasionalisasi teori *Rational Choice* model Aktor Rasional oleh Graham T. Allison dalam mengungkap alasan-alasan yang melatarbelakangi penolakan Viktor Orban terhadap rancangan sanksi Uni Eropa ke Rusia.

a) *Problem Recognition and Definition*

Pada tahapan ini terdapat dua permasalahan yaitu ketergantungan Hungaria pada energi Rusia dan opini publik Hungaria dalam survei Konsultasi Nasional.

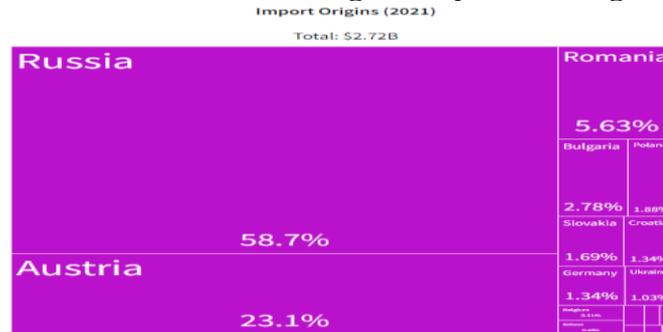
1) Ketergantungan Hungaria Pada Energi Rusia

Dalam penelitian ini, Viktor Orban melihat rancangan sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ke Rusia sebagai ancaman pemutusan hubungan kerja sama energi Hungaria dengan Rusia. Hungaria yang telah memiliki hubungan kerja sama dengan Rusia dalam bidang energi membuat Hungaria ketergantungan terhadap pasokan energi dari Rusia. Ketergantungan Hungaria pada energi Rusia dapat dilihat dari sumber energi dan besarnya penggunaan energi tersebut di Hungaria. Hungaria sendiri mendapatkan sebagian besar listriknya dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada tahun 2022, sebanyak 44,6% dari total pembangkit listrik Hungaria berasal dari sumber tenaga nuklir. Lalu, pembangkit listrik berbahan bakar gas menduduki peringkat kedua. Sehingga, pada tahun 2022, sekitar 35% produksi listrik Hungaria berbasis bahan bakar fosil. Dapat diperhatikan bahwa sumber energi nuklir dan bahan bakar fosil menjadi sumber utama di Hungaria saat ini (Statista Research Department, 2023c).

Penjelasan di atas didukung dengan adanya bukti *The Paks Nuclear Power Plant* (NPP), dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Paks atau Paks I dioperasikan pada awal tahun 1980-an dengan sumber dana berasal dari bank

Rusia. Paks I yang menghasilkan 35% pasokan listrik Hungaria dan energi nuklir dianggap telah memainkan peran penting dalam bauran energi Hungaria. Bahkan, Paks I dianggap sebagai fasilitas pembangkit listrik utama Hungaria. (International Trade Administration, 2022b).

Gambar 3. Data historis gas minyak di Hungaria

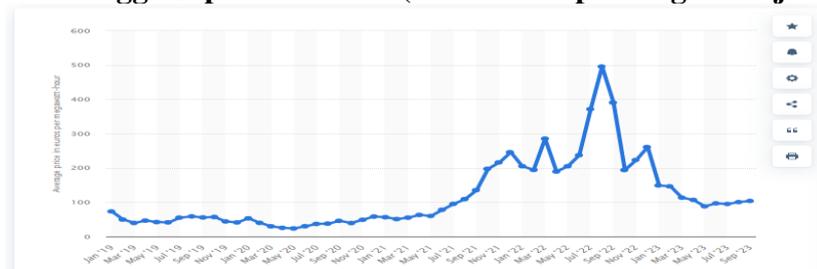


Sumber: Observatory of Economic Complexity, 2023

Pada tahun 2021 Patrolem Gas menjadi produk impor terbanyak ke-7 di Hungaria, dengan pengimpor utama berasal dari Rusia sebanyak \$1,6 miliar. Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa pasar impor yang tumbuh paling cepat di Petroleum gas untuk Hungaria antara tahun 2020 dan 2021 adalah Rusia (\$1,06 miliar), Austria (\$156 juta), dan Rumania (\$129 juta) (Observatory of Economic Complexity, 2023). Pada laporan *International Energy Agency* dalam *Hungary 2022 Energy Policy Review*, disebutkan bahwa ketergantungan Hungaria pada impor energi telah meningkat selama dekade terakhir dikarenakan permintaan bahan bakar fosil yang meningkat mencapai 87% pada tahun 2020. Dengan persentase Rusia menyumbang sebanyak 64% impor minyak mentah dan 95% impor gas (International Energy Agency, 2022).

Hungaria juga memiliki ketergantungan dalam mempertahankan harga jual energi dalam negerinya. Seperti yang diketahui bahwa sebagian besar listrik di Hungaria bersumber dari pembangkit listrik tenaga nuklir (Statista Research Department, 2023b). Dalam laporan “*Electricity prices for households in Hungary 2010-2022*”, diketahui bahwa harga listrik di Hungaria telah mengalami penurunan dalam jangka tahun 2010 hingga 2022 (Medve, 2023). Pada paruh pertama tahun 2010, harga listrik dari 17,01 sen euro per kilowatt hour (kWh), turun menjadi 9,48 sen per kWh pada paruh pertama tahun 2022 (Medve, 2023).

Gambar 4. Harga grosir listrik rata-rata bulanan di Hongaria dari Januari 2019 hingga September 2023 (dalam euro per megawatt-jam)



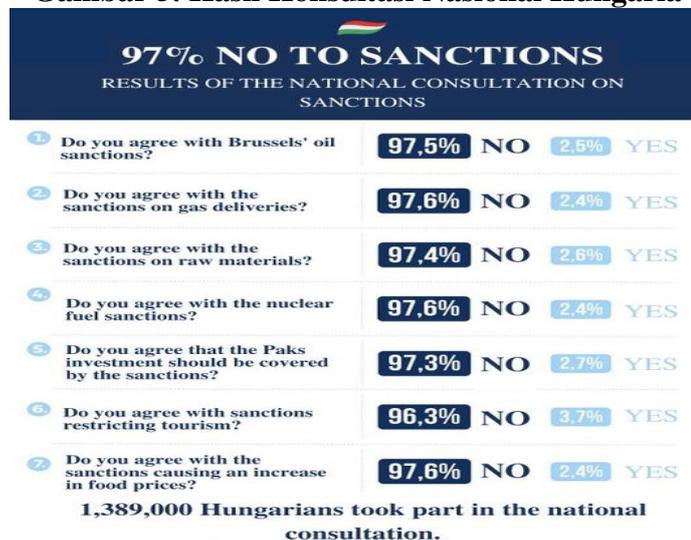
Sumber: Statista Research Department, 2023

Dari gambar 4 diketahui bahwa harga listrik Hungaria mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September 2022. Pada bulan Agustus 2022, harga listrik Hungaria sekitar 495,7 euro per megawatt-jam. Sedangkan pada bulan September 2022, harga listrik Hungaria sekitar 390,4 euro per megawatt-jam. Dari gambar 4.2 juga dapat disimpulkan bahwa harga energi Hungaria selama dua tahun terakhir terus meningkat dan kembali menurun saat memasuki tahun 2023 (Statista Research Department, 2023).

2) Opini Publik Hungaria: Konsultasi Nasional

Selain dari ketergantungan energi Hungaria dengan pasokan energi Rusia, Viktor Orban turut mempertimbangkan adanya opini publik Hungaria. Pada 30 September 2022, juru bicara Perdana Menteri Hungaria yaitu Gergely Gulyás mengatakan kepada pihak media dalam jumpa pers pemerintah bahwa pemerintah Hungaria menganggap penting untuk mengukur opini publik tentang sanksi Uni Eropa ke Rusia atas pertimbangan dampaknya yang dapat merugikan banyak pihak. Gulyás menyampaikan bahwa pada 28 September 2022, pemerintah Hungaria menyetujui proposal yang dibuat oleh partai Fidesz untuk mengadakan survei publik bernama Konsultasi Nasional mengenai rancangan paket sanksi yang dikeluarkan Uni Eropa terhadap Rusia (About Hungary, 2022). Pada 14 Oktober 2022, pemerintah Hungaria akhirnya meluncurkan Konsultasi Nasional mengenai kebijakan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dengan sejumlah pertanyaan seperti tertera pada gambar di bawah ini (Fazekas, 2022).

Gambar 5. Hasil Konsultasi Nasional Hungaria



Sumber: Twitter.com

Dari gambar 4. dapat diartikan bahwa sebanyak 97,5% responden menentang sanksi minyak Brussels (Uni Eropa), 97,6% responden menentang sanksi pengiriman gas, 97,4% responden menentang sanksi pada bahan baku, 97,6% responden menentang sanksi bahan bakar nuklir, 97,3% responden menentang investasi Paks harus tercakup dalam sanksi. Selain respon mengenai energi, sebanyak 96,3% responden juga menentang sanksi yang membatasi pariwisata, serta 97,6% responden menentang sanksi yang menyebabkan kenaikan harga pangan (Brzozowski, 2023).

Konsultasi Nasional menjadi puncak dari oposisi yang dilakukan Viktor Orban selama bertahun-tahun pada sanksi Uni Eropa terhadap Rusia (Fazekas, 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Konsultasi Nasional yang diajukan oleh Partai Fidesz dan diselenggarakan oleh pemerintah Hungaria merupakan alasan sekaligus alat yang digunakan oleh Perdana Menteri Viktor Orban dalam menolak mendukung rancangan paket sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ke Rusia.

b) *Goal Selection*

Pada tahapan *goal selection*, Allison berpendapat bahwa aktor utama akan menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kepentingan serta keamanan nasionalnya. Dalam penelitian penulis, Viktor Orban dan partai Fidesz memiliki kepentingan yang berkaitan dengan keamanan energi Hungaria, terutama dalam mengamankan ketersediaan sumber daya alam untuk konsumsi energi di Hungaria (Cherp and Jewell, 2014).

Pasokan energi yang diimpor dari Rusia membuat harga energi dalam negeri Hungaria menjadi rendah. Harga energi yang rendah ini kemudian menjadi kekuatan Viktor Orban dan partai Fidesz dalam berkuasa di Hungaria. Dalam hal ini, Viktor Orban dan partai Fidesz memiliki kepentingan untuk tetap *exist* menjadi pemimpin di Hungaria dan kepentingan tersebut membutuhkan dukungan dari masyarakat Hungaria. Dukungan dari masyarakat akan tetap ada ketika partai Fidesz sebagai penguasa dalam pemerintahan mampu tetap menjaga ketersediaan energi dengan harga yang tetap murah. Hal ini hanya dapat diperoleh ketika Rusia tetap menjadi partner kerja sama Hungaria. Oleh karena itu, Hungaria yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban dari partai Fidesz menolak rancangan paket sanksi Uni Eropa yang berkaitan dengan energi ke Rusia.

Pada tulisan berjudul “*Viktor Orbán’s Anti-Sanctions Campaign Sparks Fears of EU Disunity on Russia*” milik Péter Fazekas, disebutkan bahwa secara ekonomi, Hungaria menjadi salah satu negara yang paling terpengaruh oleh perang Rusia melawan Ukraina. Selain dari penurunan ekonomi yang meningkat, Hungaria juga menghadapi tingkat inflasi yang tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Uni Eropa. Hal ini kemudian memicu ketidakpuasan rakyat Hungaria terhadap Perdana Menteri Viktor Orban dan partai Fidesz yang sedang berkuasa. Sehingga untuk menghindari hilangnya popularitas yang telah mereka bangun sejak lama di antara para pemilih dan oposisinya, Perdana Menteri Viktor Orban dan partai Fidesz menyalahkan sanksi atas kesulitan ekonomi Hungaria. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Perdana Menteri Viktor Orban menggunakan Konsultasi Nasional dan kampanye propaganda untuk melawan Uni Eropa (Fazekas, 2022).

c) *Identification of Alternative*

Pada tahapan *identification of alternative*, aktor akan mempertimbangkan dua pilihan beserta konsekuensi yang berisikan keuntungan dan kerugian (*cost and benefit*) demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini, Viktor Orban memiliki dua pilihan alternatif yaitu:

1) **Mendukung rancangan paket sanksi Uni Eropa ke Rusia**

Pilihan alternatif pertama yaitu Viktor Orban memberikan dukungan terhadap rancangan paket sanksi Uni Eropa ke Rusia dengan *cost and benefit* sebagai berikut.

Cost: a) Hungaria harus mencari alternatif sumber pasokan energi dengan negara lain.; b) Harga energi yang berbeda memungkinkan adanya kenaikan harga energi di Hungaria; c) Eksistensi Viktor Orban dan partai Fidesz pada pemilu selanjutnya terancam tidak terpilih dan tidak dapat berkuasa kembali di Hungaria; dan d) Opini publik Hungaria yang menolak rancangan sanksi Uni Eropa ke Rusia dapat berubah menjadi protes dalam negeri yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di Hungaria

Benefit: a) Voting suara rancangan paket sanksi di Dewan Uni Eropa tidak terhambat; dan b) Tidak menjadikan Hungaria sebagai negara oposisi dalam negara anggota Uni Eropa perihal keberpihakan Uni Eropa kepada Ukraina melawan Rusia.

2) Menolak mendukung rancangan paket sanksi Uni Eropa ke Rusia

Pilihan alternatif kedua yaitu Viktor Orban menolak memberikan dukungan terhadap rancangan paket sanksi Uni Eropa ke Rusia dengan *cost and benefit* sebagai berikut.

Cost: a) Dianggap sebagai hambatan bagi kesatuan suara dalam pemungutan suara rancangan paket sanksi di rapat Dewan Uni Eropa; dan b) Menjadikan Hungaria sebagai negara oposisi dalam negara anggota Uni Eropa perihal keberpihakan Uni Eropa kepada Ukraina melawan Rusia.

Benefit: a) Hubungan kerja sama Hungaria dengan Rusia tetap terjaga; b) Tidak perlu adanya pemutusan hubungan kerja sama energi antara Hungaria dan Rusia; c) Kestabilan harga energi di Hungaria tetap terjaga; d) Harga energi yang tetap rendah di Hungaria menjadi kekuatan bagi Viktor Orban dan partai Fidesz untuk berkuasa di Hungaria dan kemungkinan menang kembali di pemilu selanjutnya; dan e) Eksistensi Viktor Orban dan partai Fidesz tetap terjaga.

d) *Choice*

Pada tahapan terakhir yaitu terdapat pilihan rasional dari aktor utama dengan cari mengoptimalkan hasil (*value maximizing*). Pada penelitian ini, diketahui bahwa Viktor Orban memilih untuk menolak mendukung rancangan paket sanksi Uni Eropa berisikan sanksi energi ke Rusia. Hal ini dikarenakan Viktor Orban dan partai Fidesz memiliki tujuan dan kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya di Hungaria, terutama pada pemilu selanjutnya. Selain itu, Hungaria juga memiliki ketergantungan energi yang besar pada pasokan energi dari Rusia. Adanya rancangan paket sanksi Uni Eropa yang berkaitan dengan sanksi energi ke Rusia akan memberikan dampak perubahan yang besar bagi Hungaria, terutama harga energi dalam negeri Hungaria. Hal ini tentunya akan melemahkan eksistensi kekuasaan Viktor Orban dan partai Fidesz di Hungaria yang sejak awal kekuasaannya telah membawa perubahan dalam bidang energi di Hungaria, terutama saat menjalin hubungan kerja sama dengan Rusia.

Selain dari mempertimbangkan tujuan dan kepentingannya, Viktor Orban juga mempertimbangkan adanya opini publik Hungaria mengenai rancangan paket sanksi Uni Eropa ke Rusia. Dalam survei Konsultasi Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Hungaria, terdapat penolakan juga oleh masyarakat Hungaria yang mengikuti survei tersebut. Oleh karena itu, Viktor Orban dan partai Fidesz

menjadikan hal tersebut sebagai permasalahan yang timbul akibat adanya rancangan paket sanksi Uni Eropa ke Rusia, dalam hal ini berkaitan dengan rancangan paket sanksi energi.

Penolakan Viktor Orban terhadap rancangan paket sanksi Uni Eropa ke Rusia juga disertai dengan adanya kampanye papan reklame nasional. Setelah terlaksananya Konsultasi Nasional, pemerintah Hungaria yang dipimpin oleh Viktor Orban mempromosikan Konsultasi Nasional tersebut dengan kampanye poster maupun papan reklame secara nasional berisikan gambar bom atau rudal yang diumpamakan sebagai sanksi dengan *tagline* “Sanksi Brussel, mereka menghancurkan kita (Hungaria)” (Tidey, 2022).

Gambar 7. Sanksi Uni Eropa digambarkan sebagai bom sebenarnya dalam propaganda anti-sanksi pemerintah Hungaria



Sumber: Telex, 2022

Gambar 8. Perang Ukraina: Hongaria membandingkan sanksi UE terhadap Rusia dengan bom adalah 'tidak pantas'



Sumber: Telex, 2022

Di Debrecen, Hungaria Timur, poster-poster propaganda pemerintah Hungaria terlihat di setiap sudut jalan. Dengan warnanya yang mencolok dan pesan yang eksplisit, tujuan pemerintah Hungaria adalah untuk mendorong warga Hungaria mengambil bagian dalam Konsultasi Nasional. Jean-Baptiste Chastand pada situs *Le Monde* membagikan tulisannya dan mengatakan bahwa aksi kampanye anti sanksi Uni Eropa oleh pemerintah Hungaria sebagai perlawanan atas sanksi yang dikeluarkan (Chastand, 2022). Melalui kampanye tersebut, pemerintah Hungaria menyampaikan bahwa sanksi Uni Eropa menghancurkan Hungaria dan membandingkan sanksi Uni Eropa dengan rudal yang mirip dengan yang diluncurkan secara aktif di Ukraina (Fazekas, 2022)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampanye anti sanksi Uni Eropa yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria dibawah pimpinan Viktor Orban merupakan bentuk perlawanan atas sanksi yang dikeluarkan Uni Eropa. Kampanye anti sanksi Uni Eropa tersebut juga sebagai alat pendukung adanya Konsultasi Nasional yang

diadakan oleh pemerintah Hungaria dalam mengajak warga Hungaria dalam berpartisipasi dalam kampanye anti sanksi Uni Eropa tersebut.

Kesimpulan

Viktor Orban selaku Perdana Menteri Hungaria menolak rancangan sanksi Uni Eropa ke Rusia dengan mempertimbangkan seluruh opsi berdasarkan perhitungan rasional meliputi *problem recognition and definition*, *goal selection*, *identification of alternative*, dan *choice*. Ditemukan bahwa identifikasi dan definisi masalahnya yaitu adanya ketergantungan Hungaria pada pasokan energi Rusia dan pertimbangan opini publik Hungaria terhadap rancangan paket sanksi Uni Eropa ke Rusia, dalam hal ini rancangan paket sanksi mengenai sanksi energi. Lalu pada *goal selection*, diketahui Viktor Orban dan partai Fidesz memiliki kepentingan untuk tetap *exist* berkuasa di Hungaria dan hal tersebut berkaitan dengan keamanan energi Hungaria, terutama dalam mengamankan ketersediaan sumber daya alam untuk konsumsi energi di Hungaria. Dengan mengidentifikasi *cost and benefit*, maka Viktor Orban memilih pilihan untuk menolak rancangan sanksi tersebut. Ini dikarenakan *benefit* yang di dapat lebih banyak daripada *cost*, seperti tidak perlu adanya pemutusan hubungan kerja sama energi antara Hungaria dan Rusia, kestabilan harga energi di Hungaria tetap terjaga, dan eksistensi Viktor Orban dan partai Fidesz tetap terjaga pada pemilu selanjutnya. Meskipun keputusan pilihan tersebut berubah kembali, dimana Viktor Orban memberikan *vote "yes"* pada saat *voting* di *meeting* Dewan Uni Eropa.

Daftar Pustaka

- About Hungary. (2022). *Gulyás: It is vital to gauge public opinion on EU sanctions*. Available at: <https://abouthungary.hu/news-in-brief/gulyas-it-is-vital-to-gauge-public-opinion-on-eu-sanctions>.
- Allison, G.T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Canada: Little, Brown and Company.
- Amnesty International (2021) *Hungary: Status of the Hungarian Judiciary – Legal Changes have to Guarantee the Independence of Judiciary in Hungary*. EUR 27/3623/2021.
- BBC (2023). *What is a war crime and could Putin be prosecuted over Ukraine?*. BBC News. Available at: <https://www.bbc.com/news/world-60690688>.
- Bendor, J. and Hammond, T.H. (1992) 'Rethinking Allison's Models', *The American Political Science Review*, 86(2), pp. 301–322.
- Britannica. (2023). *Viktor Orbán*. Available at: <https://www.britannica.com/biography/Viktor-Orban>.
- Center for Preventive Action (2024) *War in Ukraine, Council on Foreign Relations*.
- Chastand, J.B. (2022). *In Hungary, Orban defends Moscow against "Brussels sanctions"*.
- Cherp, A. and Jewell, J. (2014). *The concept of energy security: Beyond the four As*. *Energy Policy*, 75, pp. 415–421.
- Consilium European Council. (2022). *EU adopts its latest package of sanctions against Russia over the illegal annexation of Ukraine's Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions, European Council*. Available at: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/06/eu-adopts-its-latest-package-of-sanctions-against-russia-over-the-illegal-annexation-of-ukraine-s-donetsk-luhansk-zaporizhzhia-and-kherson-regions/>.

- DBpedia. (2023). *About: Katalin Novák*. Available at: https://dbpedia.org/page/Katalin_Novák.
- Fazekas, P. (2022). *Viktor Orbán's Anti-Sanctions Campaign Sparks Fears of EU Disunity on Russia*. Jamestown Foundation, 19(163).
- International Energy Agency. (2022). *Hungary 2022 Energy Policy Review*.
- International Trade Administration. (2022a). *Hungary - Country Commercial Guide*. Available at: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/hungary-energy#:~:text=Hungary uses 10 billion cubic,of which comes from Russia>.
- International Trade Administration. (2022b). *Hungary - Country Commercial Guide*. Available at: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/hungary-energy#:~:text=Hungary uses 10 billion cubic,of which comes from Russia>.
- Koh, F. (2023). *Hungary maintains "pragmatic relationship" with Russia for energy needs, condemns Ukraine war: Foreign minister*. Channel News Asia.
- Magyarország Kormánya. (2011). *The Fundamental Law Of Hungary*. Available at: [https://web.archive.org/web/20140629205136/http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The New Fundamental Law of Hungary.pdf](https://web.archive.org/web/20140629205136/http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The%20New%20Fundamental%20Law%20of%20Hungary.pdf).
- Medve, F. (2023). *Electricity prices for households in Hungary 2010-2022*. Statista Department Research. Available at: <https://www.statista.com/statistics/418103/electricity-prices-for-households-in-hungary/#:~:text=Hungarian electricity consumers have experienced,the first half of 2022>.
- Observatory of Economic Complexity. (2023). *Petroleum Gas in Hungary*. Available at: [https://oec.world/en/profile/bilateral-product/petroleum-gas/reporter/hun#:~:text=Hungary imports Petroleum Gas primarily,%2C and Romania \(%24129M\)](https://oec.world/en/profile/bilateral-product/petroleum-gas/reporter/hun#:~:text=Hungary imports Petroleum Gas primarily,%2C and Romania (%24129M)).
- Official Journal of The European Union. (2022). *Council Regulation (EU) 2022/879 of 3 June 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R0879>.
- Official Journal of The European Union. (2023a). *Council Decision (CFSP) 2023/434 of 25 February 2023 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.059.01.0593.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A059I%3ATOC>.
- Pposing Europe Research Network. (2023). *Referendum Briefing No 4 The Hungarian Eu Accession Referendum 12 April 2003*.
- President of Ukraine. (2021). *Joint statement following the 23rd EU-Ukraine Summit*. Available at: <https://www.president.gov.ua/en/news/spilna-zayava-zapidsumkami-23-go-samitu-ukrayina-yevropejsk-71037>.
- Rácz, A. (2021). *Authoritarian Ties: The Case of Russia and Hungary*. Wilson Center. Available at: <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/authoritarian-ties-case-russia-and-hungary>.
- Reuters. (2022). *Hungary cannot support new EU sanctions against Russia in present form, Orban says*. Reuters.

- RFE/RL's Russian Service. (2021). *Hungary Signs New Long-Term Gas Supply Deal With Russia*. Available at: <https://www.rferl.org/a/hungary-russia-gazprom-gas/31479747.html>.
- Rosatom. (2023). *Rosatom - International Relations*. Available at: <https://www.rosatom.ru/en/about-us/international-relations/#:~:text=Rosatom is the official Russian,international nuclear non-proliferation effort>.
- Shargh. (2022). *Hungary vows to prevent new EU sanctions against Russian gas*.
- Statista Research Department. (2023a). *Average monthly electricity wholesale price in Hungary from January 2019 to September 2023*. Available at: <https://www.statista.com/statistics/1314534/hungary-monthly-wholesale-electricity-price/#:~:text=In September 2023%2C the average,495.7 euros per megawatt-hour>.
- Statista Research Department. (2023b). *Hungary: power production share by source 2022*. Available at: <https://www.statista.com/statistics/1235432/hungary-distribution-of-electricity-production-by-source/#:~:text=Hungary sources most of its electricity from nuclear power plants>.
- Statista Research Department. (2023c). *Power production breakdown in Hungary 2022, by source*. Available at: <https://www.statista.com/statistics/1235432/hungary-distribution-of-electricity-production-by-source/#:~:text=Hungary sources most of its electricity from nuclear power plants>.
- Szöke, S. (2023). *Hungary concludes three energy agreements with Russia*. Ceenergy News.
- Than, K. and Komuves, A. (2022). *Hungary cannot support any new EU energy sanctions against Russia - govt*. Reuters.
- Tidey, A. (2022). *Ukraine war: Hungary comparing EU sanctions on Russia to bombs is "inappropriate"*.
- Troianovski, A. and MacFarquhar, N. (2022). *Putin Announces Start to "Military Operation" Against Ukraine*. New York Times. Available at: <https://www.nytimes.com/2022/02/23/world/europe/ukraine-russia-invasion.html>.
- Walker, N. (2023). *Conflict in Ukraine: A Timeline (2014 - eve of 2022 invasion)*. Available at: <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9476/CBP-9476.pdf> (Accessed: 1 May 2024).
- Website of The Hungarian Government. (2019). *The Government*. Available at: <https://2015-2019.kormany.hu/en/doc/the-hungarian-state/the-government-and-commissioners/the-government>.